

Tokoh Politik Islam Era Orde Lama Indonesia: Kajian Pemikiran KH Idham Chalid dalam Menerima Konsep Demokrasi Terpimpin Tahun 1965

Andri Nurjaman^{1*}, Arzam², Zufriani², Doli Witro¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

²Institut Agama Islam Negeri Kerinci

*andrienurjaman99@gmail.com

Abstract. *After the ups and downs of the cabinet during the parliamentary democracy or often referred to as liberal democracy, Soekarno implemented a new concept and model of democracy since 1959 called guided democracy. KH Idham Chalid who at that time served as chairman of PBNU issued his political ijtihad that guided democracy was in accordance with Islamic teachings. The purpose of writing this article is to find out the ijtihad of KH Idham Chalid, especially his thoughts on the concept of guided democracy. The method used in the preparation of this article uses the historical method, namely heuristics (search for sources), the main primary sources are the Islamic fire magazine published in 1965 and the book Islam and Guided Democracy, both primary sources written directly by KH Idham Chalid. Criticism (source selection), interpretation (interpretation) and historiography (writing). The results of this study are known that KH Idham Chalid accepts the concept of guided democracy because it is in accordance with Islamic teachings, namely syuro or deliberation, apart from that the politics of the Sunni Nahdlatul Ulama are flexible, accommodating, and choose to cooperate with the authorities.*

Keywords: *Political Thought, KH Idham Chalid, Guided Democracy*

Abstrak. Setelah jatuh banggunya kabinet selama masa demokrasi parlementer atau sering juga disebut dengan demokrasi liberal, Soekarno menerapkan konsep dan model demokrasi baru sejak tahun 1959 yang disebut dengan demokrasi terpimpin. KH Idham Chalid yang pada saat itu menjabat sebagai ketua PBNU mengeluarkan ijtihad politiknya bahwa demokrasi terpimpin sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui ijtihad KH Idham Chalid khususnya pemikiran beliau mengenai konsep demokrasi terpimpin. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode sejarah, yaitu *heuristik* (pencarian sumber), sumber primer utamanya adalah majalah api Islam yang terbit pada tahun 1965 dan buku Islam dan Demokrasi Terpimpin yang kedua sumber primer tersebut ditulis langsung oleh KH Idham Chalid. *Kritik* (seleksi sumber), *interpretasi* (penafsiran) dan *historiografi* (penulisan). Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa KH Idham Chalid menerima konsep demokrasi terpimpin karena sesuai dengan ajaran Islam yaitu *syuro* atau musyawarah, selain dari itu politik sunni Nahdlatul Ulama yang luwes, akomodatif dan memilih bekerjasama dengan penguasa.

Kata kunci: Pemikiran Politik, KH Idham Chalid, Demokrasi Terpimpin

PENDAHULUAN

Demokrasi artinya suatu sistem yang mengatur kehidupan bernegara yang lahir dari suatu tuntutan masyarakat Barat mengenai hak yang sama didepan mata hukum (Irawan, 2007: 57). Kata demokrasi tersebut diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu *demos* dan *kratos* artinya pemerintahan dari untuk dan oleh rakyat (Indianto S., Nurasih, & Witro, 2021; Witro, 2019).

Awal mula demokrasi berasal dari peradaban Yunani kuno tepatnya berasal dari Polis Athena yang dianggap sebagai pusat keilmuan (Wasino, 2009). Sistem demokrasi tersebut didasarkan pada suara terbanyak dengan pemungutan suara, begitupun jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan publik, namun sistem demokrasi ini mulai lenyap seiring semakin surutnya peradaban Yunani kuno tersebut.

Lalu pada zaman Reinaisance, demokrasi ini muncul kembali di tanah Eropa, pada zaman ini menggali warisan-warisan peradaban Yunani kuno termasuk demokrasi. Maka bermunculan para pemikir-pemikir atau yang disebut dengan filsuf seperti John Locke, Roscoe, dan Montesquieu (Kurniawan, 2016: 95).

Pengetahuan mengenai demokrasi yang berkembang di Eropa diserap oleh sekelompok mahasiswa asal Indonesia yang menimba ilmu di sana seperti Muhammad Hatta. Pada zaman Muhammad Hatta ini, ide gagasan demokrasi menjadi gerakan untuk menuntut kemerdekaan Indonesia, ide demokrasi yang berasal dari negeri penjajah (Eropa) diadopsi dan *dikawinkan* dengan kondisi nyata di Indonesia dengan ciri khas Indonesia.

Setelah kekalahan Jepang melawan sekutunya dan momentum ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945, ide demokrasi mulai diterapkan di Indonesia. Tidak ada penolakan yang tajam dari para pendiri bangsa, bahkan dari kalangan Islam tradisional pun tidak menampilkan penolakan yang keras. Di usia yang masih muda, Indonesia mulai menerapkan sebuah sistem demokrasi yang disebut dengan demokrasi liberal yang menganut sistem demokrasi barat. Susunan pemerintahan yang dibentuk dalam kabinet tersebut bertanggung jawab terhadap parlemen yang dibentuk bukan melalui pemilu, karena keadaan masih darurat untuk diadakan pemilu nasional. Demokrasi parlementer ini berlangsung secara jatuh bangun, silih bergantinya kabinet dan ini menunjukkan begitu sulitnya menerapkan demokrasi. Namun Indonesia mampu bertahan dalam situasi sulit tersebut, dan akhirnya Belanda bersedia

memberikan pengakuan terhadap Indonesia.

Sejak tahun 1950 maka ditetapkanlah suatu Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dalam rangka mendukung parlementer yang sudah berjalan. Indonesia pada masa demokrasi parlementer, selain jatuh banggunya kabinet selama demokrasi parlementer tersebut, harus diakui bahwa pada tahun 1955 terjadi pemilu pertama di Indonesia yang dianggap sebagai pemilu paling demokrasi sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Setelah pemilu tersebut parlemen baru terbentuk tetapi tetap menimbulkan pertentangan-pertentangan politik didalamnya dan ternyata tidak bertahan lama (Adrian, 2011: 188-189).

Dalam pandangan Muhammad Hatta kemelut demokrasi parlementer dan jatuh banggunya kabinet disebabkan oleh ketamakan terhadap harta serta mementingkan partai, partai politik pada masa itu sangat dijadikan sebagai orientasi utama dari pada kepentingan masyarakat dan bangsa, yang seharusnya partai hanya dijadikan sebagai kendaraan saja (Kurniawan, 2016: 99).

Adapun pihak militer memang dari sejak penerapan demokrasi parlementer tidak setuju dengan konsep demokrasi tersebut dan mulai mendesak presiden untuk segera mengakhiri sistem demokrasi parlementer tersebut. Sampai pada tanggal 17 Oktober 1952 meriah diarahkan ke istana, namun Soekarno bisa mengatasinya, bagaimana pun Soekarno pada saat itu masih sangat kuat jika dilawan secara terang-terangan dan revolusioner. Sistem demokrasi liberal atau parlementer terus berjalan, walaupun sebenarnya presiden Soekarno kurang sepaksat terhadap sistem demokrasi tersebut sembari mencari alternatif lain.

Sejak tahun 1957 alternatif barupun muncul dari presiden Soekarno, dan pada tahun 1959 Soekarno mulai memperlihatkan sebuah konsep baru mengenai sistem demokrasi Indonesia yaitu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin tersebut menurut pandangan Soekarno dianggap suatu sistem demokrasi yang cocok bagi Indonesia karena memiliki ciri khas bangsa Indonesia dan tentunya lebih baik dari pada sistem demokrasi parlementer/ liberal yang menginduk ke Barat. Konsep demokrasi terpimpin ini berasal dari suatu tradisi masyarakat Indonesia di pedesaan, sistem demokrasi yang dipimpin oleh seorang yang dianggap *sesepuh*, suatu sistem yang tidak akan melahirkan saling adu sikut dan adu mulut, pertentangan dan kemelutpun bisa teratasi karena adanya sosok *sesepuh* tadi dalam sistem demokrasi tersebut. Maka melalui dekrit presiden 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengakhiri sistem demokrasi parlementer/ liberal yang ala barat dan memulai sistem demokrasi terpimpin khas bangsa Indonesia (Cindy, 1984: 423-424).

Langkah tegas Soekarno ditunjukkan dengan membubarkannya Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk dari hasil pemilu 1955 karena perselisihan anggaran negara. Banyak pihak yang menentang Soekarno, namun dekrit presiden tersebut terus jalan karena didukung oleh kalangan militer yang sejak awal sudah tidak mendukung dengan sistem demokrasi parlementer. Namun yang paling menentang menangani demokrasi terpimpinnya Soekarno datang dari orang kedua di Indonesia, wakil dari presiden Indonesia pertama, yaitu Muhammad Hatta, beliau muncul sebagai kritikus terhadap sistem demokrasi terpimpinnya Soekarno dan menawarkan sistem demokrasi lain yang termuat dalam sebuah tulisan berjudul “Demokrasi Kita” (Kurniawan, 2016: 101).

Hatta menganggap bahwa Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya sudah jatuh pada sikap kediktatoran, menurutnya demokrasi terpimpin tidak akan bertahan lama dari usia Soekarno sendiri. Menurut pandangan Hatta bahwa demokrasi Indonesia harus demokrasi bersifat demokrasi-sosial. Hatta menganggap bahwa tidak hanya demokrasi politik saja yang diterapkan di Indonesia harus juga demokrasi ekonomi. Demokrasi sosial-ekonomi inilah yang menurut Hatta akan mensejahterakan masyarakat Indonesia yang akan melahirkan keadilan sosial. Demokrasi sosial ekonomi menurut Hatta tersebut berdasarkan tiga sumber yaitu paham sosialis Barat, ajaran Islam dan masyarakat Indonesia sendiri, dan demokrasi ini hanya bisa berjalan dengan syarat tertentu Syarat tersebut menurut Hatta yaitu,

”Adanya kesadaran akan tanggungjawab dan toleransi serta kesediaan hati untuk melaksanakan prinsip the right man in the right place –orang yang tepat pada tempat yang tepat.”

Demokrasi merupakan bagian dari politik, dan politik tidak bisa lepas dari media massa, karena politik dan media saling membutuhkan. Para pelaku politik baik negarawan maupun politikus partai membutuhkan media untuk melakukan penyebaran idenya tersebut sedangkan media membutuhkan politik sebagai suatu berita yang layak dan laku terjual di masyarakat (Kadriyanti, 2013: 5).

Salah satu media yang dijadikan sebagai alat untuk menyebar luaskan pemikiran dan konsep demokrasi terpimpinnya Soekarno adalah majalah “Api Islam” yang dibangun melalui Yayasan Api Islam dan didirikan oleh KH Idham Chalid serta KH Syaifudin Zuhri. KH Idham Chalid yang waktu itu menjabat sebagai ketua PBNU sekaligus sebagai ketua partai Nahdlatul Ulama telah menerima konsep demokrasi terpimpin, melalui hasil pemikirannya, ia berusaha menjembatani antara konsep demokrasi terpimpin dengan Islam,

bahkan ada sebuah buku yang pernah dikuliahkan di hadapan mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama yang berjudul “Islam dan Demokrasi Terpimpin”. Selain itu usaha KH Idham Chalid untuk menyebarkan ide gagasan demokrasi terpimpin Soekarno tersebut adalah dengan menerbitkan sebuah majalah yang berjudul “Api Islam” pada tulisan KH Idham Chalid tersebut dengan judul besar Haluan Politik Negara, majalah Api Islam ini ditujukan untuk kalangan Islam tradisional, dan hal inilah yang akan menjadi fokus penelitian pada artikel ini.

Tidak hanya majalah Api Islam, ada sebuah buku yang ditulis oleh KH Idham Chalid yang berjudul Islam dan Demokrasi Terpimpin yang diterbitkan oleh Yayasan Api Islam di Jakarta pada tahun 1965, buku ini adalah kumpulan materi yang pernah dikuliahkan di depan mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama di Surakarta. Dari buku ini bisa melihat landasan dan dalil dari pemikiran politik KH Idham Chalid dalam menerima konsep demokrasi terpimpin.

Selanjutnya kajian pustaka dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting. Hal ini dilakukan agar penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Untuk mendapatkan orsinilitas dalam tulisan ini, dilakukan studi pustaka dari beberapa penelitian yang sudah ada. Penelitian mengenai tokoh KH Idham Chalid memang sudah cukup banyak, namun penelitian secara spesifik mengenai kajian pemikiran atau ijtihad politik KH Idham Chalid dalam menerima konsep demokrasi terpimpin presiden Soekarno tahun 1965 belum banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Penulis menemukan beberapa tulisan penelitian mengenai KH Idham Chalid, dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi dan peninjauan atas tulisan-tulisan yang sudah ada dan tentunya berkaitan dengan tema yang dikaji, yaitu diantaranya:

Pertama tulisan dengan judul “*Pemikiran Politik KH Idham Chalid*” yang ditulis oleh Rudi Salim pada tahun 2012 yang merupakan Skripsi pada jurusan Siyasah Jinayah UIN Antasari. Isi dari tulisan ini adalah corak dari pemikiran politik KH Idham Chalid yaitu demokratis nasionalis dan agamis, pemikirannya tidak otoriter dan berpegang pada musyawarah, juga berisi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi corak pemikiran politik KH Idham Chalid. Hal ini yang membedakan dengan fokus tulisan yang akan penulis bahas, fokus penelitian penulis adalah kajian pemikiran atau ijtihad politik KH Idham Chalid dalam menerima konsep demokrasi terpimpin presiden Soekarno pada tahun 1965.

Kedua tulisan dengan judul “*Biografi dan Pemikiran Dr. KH. Idham Chalid dalam Bidang Politik NU pada tahun 1956-1971*”, tulisan ini adalah sebuah Skripsi yang ditulis oleh Gito Rolis pada jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021. Tulisan ini membahas tiga pokok pikiran KH Idham Chalid yaitu menjadikan organisasi sebagai wadah dakwah, pandangan mengenai demokrasi terpimpin, dan siasat menghadapi orde baru. Berbeda dengan fokus penelitian yang akan penulis bahas adalah spesifik pada kajian pemikiran atau ijtihad politik KH Idham Chalid dalam menerka konsep demokrasi terpimpin. Rentang waktu yang diambil juga berbeda, jika Gito membatasi dari tahun 1956 sampai 1971 (Orde lama sampai orde baru) penulis memfokuskan pada tahun 1965.

Ketiga tulisan dengan judul “*Peran Nabdlatul Ulama dalam Politik Islam (Studi Tokoh dan Pemikiran K.H D.R Idham Chalid)*”, tulisan ini adalah sebuah tesis yang ditulis oleh Rahman Nasrur di Pascasarjana UIN Antasari. Tulisan ini membahas mengenai pemikiran KH Idham Chalid tentang pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan Islam yang ideal, hasilnya adalah bahwa KH Idham Chalid memiliki pemikiran mengenai politik Islam bahwa agama dan negara berhubungan secara mutualistik, jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis tulis yaitu kajian pemikiran atau ijtihad politik KH Idham Chalid dalam menerima konsep demokrasi terpimpin tahun 1965. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti membuktikan bahwa belum ada penelitian yang membahas mengenai kajian pemikiran KH Idham Chalid dalam Menerima Konsep Demokrasi Terpimpin tahun 1965.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas artikel ini membahas pemikiran politik KH Idham Chalid dalam menerima konsep demokrasi terpimpin tahun 1965. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui ijtihad KH Idham Chalid khususnya pemikiran beliau mengenai konsep demokrasi terpimpin.

Metode yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif. Melalui metode ini, dicari data dan fakta yang sebenarnya, serta keadaan saat ini. Tahapan metode sejarah dalam penelitian ini meliputi tahapan *heuristik*, *kritik*, *interpretatif*, dan *historiografi*. Bahan sejarah yang dibutuhkan untuk menulis penelitian ini dikumpulkan berdasarkan bahan-bahan yang berkaitan dengan topik yang dipilih oleh penulis (Sulasman, 2014: 93) (Abdurahman, 1999:11).

Dalam menyunting penelitian ini, dikumpulkan sumber informasi tentang pemikiran dan demokrasi terpimpin KH Idham Chalid. Di antaranya

adalah Majalah Api Islam, Haluan Politik Negara, Nomor Satu Sampai Nomor Sembilan, dan Kitab Islam dan Demokrasi Terpimpin. Sumber lainnya adalah buku Idham Chalid Guru Politik Orang NU karangan Ahmad Muhajir, Buku Napak Tilas Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah dan editornya Alief Mudatsir Mandan. Ada juga sumber artikel yang dimuat dalam jurnal yang ditulis oleh Nur Hidayatullah berjudul Idham Chalid di NU (Hidayatullah, 2018).

Subjektivitas diakui dalam penulisan sejarah, namun subjektivitas tetap harus dihindari. Dalam interpretasi ini, penulis bertujuan untuk bersikap netral tanpa berdiri disisinya. Karena penelitian yang dilakukan peneliti didasarkan pada metode yang objektif, maka hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagaimana sejarah pemikiran politik KH Idham Chalid menganut konsep demokrasi terpimpin pada tahun 1965. Dalam mempertimbangkan isu-isu yang terlibat dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sosial-politik, dan studi sosiologis politik hubungan antara bangsa dan masyarakat (Nash, 2000: 1-3) serta hubungan agama dan negara (Nurjaman, Yusuf, & Witro, 2021; Witro, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sejarah masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) di Indonesia terkait erat dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem politik dan pemerintahan ini bersifat terpusat yang membuat kekuasaan Presiden Soekarno menjadi amat kuat. Sebelumnya, Indonesia menerapkan Demokrasi Liberal (1950-1959). Namun, sistem ini tidak stabil, kabinet sering berganti yang akhirnya berdampak pada tidak dijalankannya program kerja kabinet sebagaimana mestinya. Di masa Demokrasi Liberal, partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan. Sementara itu, Majelis Konstitusi yang dibentuk pada pemilihan umum (Pemilu) 1955 belum menyelesaikan tugasnya menyusun konstitusi baru (Tirto.id, 2021).

Dekrit Presiden 1959 Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit, isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang diambil dari Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia yang ditulis oleh Mahfud M.D. (2001), adalah sebagai berikut: Pembubaran Konstituante, UUD 1945 mulai berlaku lagi, UUDS 1950 tidak berlaku, Majelis Nasional Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk. Dekrit presiden

tanggal 5 Juli 1959 menandai berakhirnya demokrasi liberal dan menggantikannya dengan demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin yang mulai berlaku antara tahun 1959 dan 1965, berarti demokrasi yang mengakui kepemimpinan. Demokrasi terpimpin merupakan gagasan untuk mereformasi kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Ide ini dikenal sebagai Inisiatif Presiden 1957. Ada dua ide utama untuk inisiatif ini; reformasi struktural politik perlu dilaksanakan melalui sistem demokrasi yang terkendali, didukung oleh kekuatan untuk mencerminkan keinginan rakyat secara seimbang dan pembentukan kabinet Gotong-Royong didasarkan pada keseimbangan kekuatan masyarakat, yang terdiri dari perwakilan partai dan kekuatan kelompok politik atau fungsional baru, yang juga dikenal sebagai kelompok kerja. Tujuan dari sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan di bawah UUD 1945, namun dalam praktiknya seringkali melanggar UUD bahkan sistem demokrasi terpimpin ini mulai ditinggalkan sejak gerakan G30S-PKI. Pada tahun 1965, Presiden Sukarno mulai melemahkan pengaruh dan kekuasaannya.

Gagasan demokrasi terpimpin digagas oleh Presiden Sukarno sejak awal tahun 1957 dan kemudian diproklamirkan oleh Majelis Konstituante pada tanggal 22 April 1957. Demokrasi terkelola sebagai sistem pemerintahan tidak boleh dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Demokrasi terpimpin secara efektif memusatkan kekuasaan di satu tangan, mengabaikan kuorum dan oposisi, dan tidak mau memilih. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945, Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, sebagai hasil dari pemilihan umum 1955, DPR dibubarkan dan diganti dengan DPR Gotong Royong. Anggota dipilih dan diangkat oleh Presiden sendiri. Demikian pula dalam pembentukan dan penyiapan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti MPRS dan DPAS. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi terkendali menyimpang dari ketentuan UUD 1945, sebagaimana dikutip dalam artikel berjudul "Pedoman Tambahan UUD 1945" yang disusun dalam Buletin MPRS (1967). UUD 1945 dan pemerintahan cenderung sentralistik. Ini karena hanya fokus pada presiden dan posisinya sangat kuat dan berkuasa (Tirto.id, 2021).

Demokrasi terpimpin memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut; sistem kepartaian yang ambigu partai-partai tidak bertujuan untuk mempersiapkan diri menduduki posisi politik pemerintah namun hanya sebagai penopang antara kekuatan lembaga presiden, TNI-AD, dan Partai Komunis Indonesia

(PKI). Melemahnya Lembaga Legislatif Pembentukan Dewan Gotong Royong DPR (DPR-GR) telah melemahkan sistem politik. DPR-GR hanyalah alat politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik lembaga juga ditentukan oleh Presiden (Tirto.id, 2021).

Hak asasi manusia sangat lemah, dan presiden mudah bergantung pada kebijakan yang bertentangan dengan kebijakannya atau mereka yang berani menentangnya. Beberapa musuh politik telah menjadi tahanan. Klimaks Penentangan Kebebasan Pers Puncaknya adalah semangat penentangan terhadap kebebasan pers. Pemerintah telah melarang penerbitan beberapa surat kabar, termasuk *Harian Abadi Masyumi* dan *Pedoman Harian PSI* (Partai Sosialis Indonesia). Otonomi daerah yang sangat terbatas Hal ini disebabkan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Biografi KH Idham Chalid

KH Idham Chalid lahir di Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah daerah bernama Setui pada tanggal 27 Agustus 1922 atau bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1341 H (Mandan, 2008: 23). KH Idham Chalid merupakan putra sulung dari pasangan Muhammad Chalid dengan Hj. Umi Hani. Pendidikan KH Idham Chalid dimulai sejak kecil dengan belajar baca tulis latin dan arab yang diajarkan langsung oleh ayahnya (Nurjaman, Sulaiman, & Purnama, 2020: 107).

Pada tahun 1930 KH Idham Chalid dan keluarganya pindah ke Pegatan, dan pada tahun 1931 KH Idham Chalid masuk Sekolah Dasar, Idham Chalid kecil termasuk anak yang cerdas dan gemar membaca. Lalu pada tahun 1932 KH Idham Chalid pindah lagi ke Amuntai (kota kelahiran ayah Idham Chalid), KH Idham Chalid melanjutkan pendidikan dasarnya di Sekolah Melayu dan lulus pada tahun 1934. Pendidikan KH Idham Chalid diteruskan di Madrasah Islam Pekapuran yang selanjutnya bernama Madrasah Rasyidiyyah. KH Idham Chalid belajar di madrasah tersebut selama empat tahun (Rohmah, 2019: 21-22). Pada pertengahan tahun 1937 KH Idham Chalid sempat belajar ke Negara selama kurang lebih delapan bulan (Mandan, 2008: 66-68). Selanjutnya pada akhir tahun 1938 KH Idham Chalid melanjutkan pendidikan lanjutannya ke Pondok Pesantren Modern Gontor. Ia belajar di kelas *kuliyatun Mua'alimin al-Islamiyyah* atau setingkat dengan SLTP selama dua tahun. Selanjutnya KH Idham Chalid naik kelas ke *Kweel School Islam* atau setingkat SLTA. Sampai pada tahun 1940 KH Idham Chalid mulai mengajar di Pondok Modern Gontor.

Pada tahun 1950 KH Idham Chalid diangkat sebagai anggota di parlemen DPRS perwakilan dari partai Masyumi. Ketika Nahdlatul Ulama memilih untuk berpisah dari Masyumi KH Idham Chalid memilih untuk aktif di NU yang bermula bergabung dengan Gerakan Pemuda Ansor. Gerakan Pemuda Ansor ini adalah salah satu badan otonom yang dimiliki Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam bidang kepemudaan dan kemasyarakatan. GP Ansor ini resmi berdiri sejak Mukhtamar NU ke-9 bertepatan pada tanggal 24 April 1934 M/ 10 Muharam 1353 H di Banyuwangi. Lalu KH Idham Chalid menjadi ketua PB Ma'arif Nahdlatul Ulama, Ma'arif Nahdlatul Ulama adalah aparat departementasi Nahdlatul Ulama yang memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pendidikan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang ada di tingkatan pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang dan pengurus majelis wakil cabang. Lalu KH Idham Chalid menjadi anggota majelis pertimbangan politik PBNU. Majelis Pertimbangan Politik PBNU ini dibentuk pada 2-3 September 1951 yang memiliki tugas mengikuti perkembangan politik di Indonesia lalu melakukan analisa-analisa dan menyimpulkan yang selanjutnya dilaporkan ke PBNU sebagai suatu saran (Rohmah, 2019: 32).

Masih pada tahun 1950 KH Idham Chalid diutus oleh KH Wahid Hasyim yang waktu itu sebagai Menteri Agama Republik Indonesia untuk mengunjungi Singapura, Bangkok, India, Pakistan, Kairo, Mesir dan Jeddah Arab Saudi untuk mengawasi persoalan haji bersama dengan Panitia Haji Indonesia (PHI), lalu KH Wahid Hasyimpun mengangkat KH Idham Chalid sebagai Koordinator Majelis Pimpinan Haji (MPH) (Mandan, 2008: 227–234).

Di tahun yang sama KH Idham Chalid selalu mendampingi KH Wahab Chasbullah untuk mengikuti safari rutin ke cabang-cabang Nahdlatul Ulama sejak berpisahannya NU dengan Masyumi (Rohmah, 2019: 32). Pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-19 di Palembang bertepatan dengan tanggal 28 April sampai 1 Mei 1952 KH Idham Chalid hadir di acara Muktabar sebagai anggota dari PBNU sekaligus sebagai utusan dari NU Kalimantan Selatan, pada Mukhtamar tersebut terpilihlah KH Idham Chalid sebagai Sekretaris Jenderal PBNU, sedangkan ketua umumnya adalah KH Maskur (Rohmah, 2019: 242).

Sejak NU memisahkan diri dari Masyumi dan mendirikan partai tersendiri, NU mengikuti pemilu pada tahun 1955. pada saat itu KH Idham Chalid bertugas sebagai ketua Lajnah Pemilihan Umum NU (Lapunu). Lapunu ini adalah suatu dewan khusus yang menangani permasalahan pemilu bagi partai NU yang dibentuk pada Mei 1953. NU memberikan keberhasilannya dalam pemilu tahun 1955 tersebut dengan mencapai prestasi empat besar

dengan 45 kursi. Bahkan pada tahun 1956 NU memiliki lima jatah menteri dalam kabinet Ali Sastroadmijoyo II.

Pada muktamar NU ke-21 di Palembang yaitu pada tahun 1956 KH Idham Chalid terpilih sebagai ketua umum PBNU. Ketika kabinet Ali Sastroadmijoyo II menyerahkan mandatnya kepada presiden pada 14 Maret 1957 dan selanjutnya membentuk Kabinet Djuanda, KH Idham Chalid terpilih kembali sebagai Wakil Perdana Menteri, jabatan ini berakhir sampai diberlakukannya demokrasi terpimpin dengan dekrit presiden pada bulan Juli 1959 (Muhajir, 2007: 43–44). Masa demokrasi terpimpin ini KH Idham Chalid menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) sampai tahun 1960. Lalu KH Idham Chalid diangkat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Pemikiran Politik KH Idham Chalid dalam Menerima Demokrasi Terpimpin tahun 1965

Ada yang menarik dari sosok KH Idham Chalid, yaitu pemikiran *syuranya* dengan demokrasi terpimpin, beliau dan NU menerima konsep demokrasi terpimpinnya Soekarno. Pemikiran Idham Chalid tersebut terdapat dalam majalah Api Islam tahun 1965 dengan judul Haluan Politik Negara edisi nomor dua sampai sembilan. Selain dari itu, pemikiran politik mengenai konsep *syura* sebagai landasan pemikiran Islam dengan demokrasi terpimpin diinformasikan dalam sebuah buku yang berjudul “Islam dan Demokrasi Terpimpin”, buku ini merupakan naskah KH Idham Chalid sebagai diktat yang pernah dikuliahkan di Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama di Surakarta, buku tersebut disusun ulang oleh H.A. Notosoetardjo dan diterbitkan oleh Api Islam pada tahun 1965 di Jakarta.

Demokrasi terpimpin Soekarno (1959-1965) adalah sistem politik yang menentang demokrasi parlementer. Pada bulan Oktober 1965, Soekarno mengutuk penyakit partai, mendesak partai untuk dikuburkan, dan mengusulkan demokrasi terpimpin untuk mengatasi gejolak politik Indonesia. Kemudian, pada 21 Februari 1957, Soekarno mengumumkan visinya di depan 900 politisi dan pemimpin lainnya di istana (Muhajir, 2007: 61–65).

Untuk merealisasikan konsep-konsep ini Soekarno membentuk perangkat politiknya dengan menyarankan dua strategi, *pertama* Soekarno membentuk sebuah kabinet yang bernama kabinet gotong royong yang mewakili semua partai yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI. *Kedua* ia

mengusulkan pembentukan sebuah dewan bernama dewan nasional yang berada langsung di bawah presiden Soekarno yang bertujuan untuk memusyawarahkan garis-garis besar haluan politik negara (nasional). Dewan nasional ini terdiri dari berbagai elemen seperti tani, buruh, cendekiawan, pengusaha, tokoh agama, angkatan bersenjata, berbagai organisasi seperti organisasi pemuda, wanita sampai pada wakil-wakil daerah. Kabinet gotong royong tadi adalah cerminan dari parlemen sedangkan dewan ini merupakan cerminan dari masyarakat secara keseluruhan. Inilah konsep demokrasi terpimpinnya Soekarno (Muhajir, 2007: 66–68).

KH Idham Chalid ketika masa demokrasi terpimpin tersebut sedang menjabat sebagai Ketua Umum Nahdlatul Ulama dan berusaha membaca dan menganalisis demokrasi terpimpin dengan pendekatan Islam. Menurut Idham demokrasi harus semua anggota masyarakat memiliki hak yang sama dan memiliki kebebasan, yang paling penting unsur dari sebuah demokrasi yaitu sampai dimana rakyat bisa menyuarakan pendapat-pendapatnya dan sampai dimana pihak penguasa menghargai musyawarah, dibentuk dalam bidang apa musyawarah tersebut dan seberapa besar musyawarah mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara (Chalid, 1965a: 33).

Pemikiran politik KH Idham Chalid mengenai demokrasi terpimpin bisa disimpulkan dengan tiga poin, *pertama*, hakekat demokrasi adalah menghormati pendapat kelompok minoritas, *kedua* kebebasan menyampaikan pendapat, atau kehendak penguasa untuk bermusyawarah, merupakan ukuran demokrasi nasional, *ketiga* konsultasi atau musyawarah adalah ukuran minimal dari sebuah demokrasi. Jadi pemikiran Idham Chalid tentang demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan kata musyawarah (Muhajir, 2007: 72).

Setelah menemukan hubungan antara demokrasi dan musyawarah, Idham Chalid menelusuri bukti demokrasi dalam Islam yang tertuang dalam al-Qur'an, hadits, sejarah atau perkataan sahabat Nabi dan Ulama. Di dalam QS. Asy-Syura ayat 38 ada anjuran untuk bermusyawarah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada kamu.”

Di dalam kandungan ayat tersebut, diperintahkan agar senantiasa memutuskan segala sesuatu harus melalui musyawarah, baik yang berhubungan dengan urusan duniawi atau yang berhubungan dengan urusan agama. Bahkan

dalam Al-Qur'an ada surat yang bernama surat Asy-syura yang artinya musyawarah. Maka dalam pandangan Islam musyawarah ini adalah suatu ajaran dari Allah SWT dan sudah ditauladankan oleh Rasulullah Saw.

Tidak hanya dalam QS.Asy-Syura, didalam QS. Ali Imran ayat 159 pun ada perintah untuk bersikap musyawarah, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepada-Nya."

Dalam QS.Ali Imran ini ditegaskan untuk bermusyawarah dalam berbagai urusan. Sedangkan Hadis nabi yang memerintahkan untuk bermusyawarah diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi dari Ibnu Abbas yang berbunyi sebagai berikut:

اما ان الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لامتي

"Allah dan rasul-Nya sebenarnya tidak memerlukan musyawarah dengan siapapun, akan tetapi disuruhnya musyawarah itu adalah semata-mata untuk kebaikan umatku".

Jelas, bahwa nabi Muhammad memiliki sifat kenabian yaitu di antaranya sifat *fathonah* yang artinya cerdas, sebetulnya dengan kecerdasan nabi tersebut nabi Muhammad Saw. tidak perlu bermusyawarah untuk menentukan sesuatu hal, namun diperintahkannya musyawarah ini adalah sebagai contoh kepada umatnya.

Di sisi lain, tafsir as-Shawi juz IV menyatakan bahwa Rasulullah Saw. berhijrah dan orang-orang Ansar selalu berkonsultasi atau bermusyawarah di antara mereka tentang hampir semua masalah. Allah pun memuji mereka dan memerintahkan Rasul untuk berkonsultasi dengan mereka melalui firman-Nya *wasya wirhum fialamr*. Dan dari tafsir ini dikutip oleh KH Idham Chalid (Muhajir, 2007: 76).

Sikap bermusyawarah ini diteruskan oleh para sahabat selepas Nabi Muhammad Saw. meninggal dunia, para sahabat bermusyawarah dalam

berbagai masalah termasuk masalah agama dan hal duniawi. Hal yang pertama kali para sahabat bermusyawarah adalah ketika menentukan pengganti Rasulullah SAW. Selain dari itu KH Idham Chalid juga mengukit pendapatnya Syaikh al-Azhar Ustaz al-Akbar Mahmud Syalthut dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah* menerangkan musyawarah adalah sebuah pondasi dari semua hukum yang sempurna, musyawarah juga adalah sebuah metode pencarian kebenaran dan dari musyawarah akan melahirkan pikiran-pikiran yang matang (Muhajir, 2007: 74).

Dari bukti-bukti di atas mengenai dalil atau petunjuk tentang musyawarah baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, sejarah para sahabat nabi dan perkataan ulama, Idham Chalid ingin menyatakan bahwa demokrasi dalam Islam adalah musyawarah atau *syura*.

KH Idham Chalid berpendapat bahwa bermusyawarah selayaknya selaras dengan yang ditauladankan oleh Nabi dengan sahabatnya, yaitu Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat yang ahli di bidangnya, contohnya Rasul bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Usman bin Khattab dalam hal peperangan dan hubungan dengan negara-negara lain. Dua sahabat ini terkenal dengan kepemimpinannya. Kebenaran tidak ditentukan oleh suara terbanyak melainkan dari pendapat para ahli dan pemimpin serta anggota permusyawaratan harus memiliki rasa tanggung jawab yang diembannya. Hal inilah yang dimaksud konsep *syura* atau demokrasi dalam Islam menurut Idham(Chalid, 1965a: 46–47).

Oleh karena itu, KH Idham Chalid mempunyai ijtihad politik bahwa sistem demokrasi liberal bertentangan dengan ajaran Islam karena memutuskan benar dan salah tergantung suara terbanyak atau banyaknya dukungan. Demokrasi Terpimpin adalah sistem demokrasi yang menghormati suara, musyawarah, dan mufakat minoritas. Oleh karena itu, menurut Idham Chalid, demokrasi terpimpin sejalan dengan konsep *syura* dalam Islam.

Tapi harus dicatat disini walaupun Idham menerima demokrasi terpimpin, Idhampun menolak sikap kediktatoran seorang pemimpin, pemimpin harus mendengar dan mau menghormati perbedaan pandangan yang lain. Demokrasi terpimpin menurut Islam oleh KH Idham Chalid harus dipandu oleh hak-hak dan anggota-anggotanya atas kehendak mereka sendiri, bukan oleh keinginan manusia akan kekuasaan(Chalid, 1965a: 59). Ada dua unsur yang menjadikan demokrasi terpimpin sesuai dengan Islam yaitu unsur musyawarah yang menghargai pimpinan dan unsur pimpinan yang menghargai musyawarah (Muhajir, 2007: 85–86).

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pemikiran politiknya, karena Idham Chalid menganut demokrasi berpedoman pada pendekatan Islam. *Pertama*, pimpinan di lingkungan NU bekerja sama atas dasar ideologi agama dan politik NU, yang mengutamakan perlindungan posisi Islam dan pemeluknya. Ideologi ini menuntut umat Islam dan ulama untuk menahan diri dari segala bentuk yang mengancam fisik dan spiritual masyarakat. Prinsip-prinsip seperti inilah yang mendorong kebijakan NU untuk berhati-hati, fleksibel, dan moderat. Selain itu, prinsip ini menempatkan kekuasaan sebagai penentu utama dalam memilih strategi. Perlawanan terhadap kekuasaan yang lebih besar hanya meningkatkan risiko kerugian Islam. Prinsip ini juga memberi NU dorongan kuat untuk melakukan pendekatan partisipatif terhadap pemerintah (Muhajir, 2007: 90–91).

Ditambah lagi sosok dari KH Idham Chalid sebagai politisi yang moderat dan luwes yang selalu memilih untuk bekerjasama dari pada menjadi oposisi dan melakukan konfrontasi, beliau lebih memilih mengikuti arus tanpa hanyut didalam arus tersebut sesuai dengan ideologi politik keagamaan NU.

Kedua, adanya perjuangan idealis yang melatarbelakangi Idham menganut demokrasi pimpinan Soekarno dalam konsep Syura. Perjuangan idealis pada masa demokrasi terpimpin adalah perjuangan antara ideologi komunis dan anti komunis. Akhirnya, Soekarno berusaha menghentikan perjuangan ideologis dengan mendirikan NASAKOM untuk mencari kesamaan dan mencoba mengintegrasikan ketiga ideologi tersebut. Dari perjuangan idealis ini, Idham Chalid ingin membuktikan bahwa Islam dapat menyelaraskan dan mendukung ide-ide dan revolusi Soekarno, serta Komunis dan pengikutnya. Diharapkan dominasi PKI atas Soekarno akan berkurang karena perhatian difokuskan pada orang-orang Islam yang dipimpin oleh Nahdlatul Ulama (Muhajir, 2007: 102).

Dan *ketiga*, karena ketidakmampuan dan ancaman politik selama demokrasi terpimpin. NU merupakan kekuatan politik Islam yang patut diperhitungkan di era demokrasi terpimpin. Namun satu-satunya kekuatan NU saat itu adalah bergabung dengan partai dan basis massanya serta melindungi kepentingannya. NU memiliki pengaruh kecil terhadap arah dan kebijakan negara. Menghadapi lawan politiknya, PKI, NU memuncak pada pemberontakan 1964 dan 1965 (Muhajir, 2007: 105).

KH Idham Chalid melakukan *rekonsiliasi* atau penyesuaian atau menjembatani antara Islam dan demokrasi terpimpin, usaha ini dijalankan melalui Yayasan Api Islam pada majalah Api Islam di bagian judul Haluan

Politik Negara tulisan KH Idham Chalid sendiri yang berusaha menunjukkan kesesuaian antara Islam dan gagasan-gagasan Soekarno.

Didalam tulisan KH Idham Chalid yang diberi judul Haluan Politik Negara tersebut, beliau menegaskan bahwa:

“Sebagaimana saudara-saudara ketahui, beberapa tahun yang lalu ketika revolusi Indonesia memulai lengan kampanye untuk demokrasi terpimpin, saya katakana sebagaimana telah dicapai dan dilaksanakan oleh nabi kita Muhammad SAW seluruh dunia luar mengatakan bahwa Indonesia telah menempuh jalan yang salah, bahwa Indonesia telah mengambil jalan kediktatoran, seterusnya dan seterusnya. Tidak, sahabat-sahabatku yang tercinta, demokrasi terpimpin bukanlah kediktatoran, bukanlah jalan yang salah. Melainkan jalan yang benar: demokrasi dengan pimpinan, dan hal itu adalah, saya ulangi lagi: tahap kedua dari revolusi Indonesia, tahap politik, yaitu revolusi politik”(Chalid, 1965b: 2 & 25).

Demokrasi terpimpin merupakan salah satu dari revolusi Indonesia, demokrasi terpimpin adalah revolusi politik, revolusi ini bertujuan untuk memberikan kepada bangsa dan seluruh rakyat Indonesia suatu kehidupan yang benar-benar demokratis tidak seperti sistem kolonial atau otokrasi atau bahkan diktator.

Tidak hanya revolusi politik dalam haluan politik negara revolusi Indonesia juga adalah revolusi ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan baru dalam lapangan ekonomi dengan tidak dijalankannya lagi ekonomi kolonial dan ekonomi kapitalistik. Revolusi Indonesia juga adalah revolusi kebudayaan dan keagamaan yang bertujuan untuk mencapai kebudayaan sendiri sesuai dengan kepribadian nasional Indonesia, pada revolusi keagamaan ingin kembali hidup didalam suatu negara yang agama Islam dapat berkembang dengan subur, dikarenakan pada masa penjajahan Islam ditekan dan ditindas. Dan yang terakhir dari revolusi Indonesia adalah membentuk manusia Indonesia menjadi manusia baru dengan mentalitas tinggi yang mendiami kepulauan Indonesia (Chalid, 1965c: 8 & 9). Revolusi nasional Indonesia merupakan revolusi yang multikomplek atau revolusi yang banyak ragamnya dan didalam satu generasi.

Revolusi Indonesia berlandaskan pada ciri-ciri khas bangsa dan rakyat Indonesia yang diilhami oleh kepribadian Indonesia sendiri. Lihatlah pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia seperti Pati Unus, Raden Fatah, Pangeran Diponogoro, Sultan Hasanudin, Syarif Hidayatullah, Imam Bonjol, Teuku Umar, Tjut Nyak Din, Patimura dan lain-lain, mereka semua adalah orang-orang yang taat pada ajaran agamanya. Mereka semua memberontak

serta melakukan perlawanan kepada kaum kolinialis, imperialis dan nekolim yang dijiwai oleh semangat agama. Bahkan ulama mengeluarkan fatwa untuk mengusir penjajah dengan hukum *fardu 'ain* atau suatu kewajiban bagi umat Islam yaitu yang disebut dengan revolusi Nahdlatul Ulama yaitu sebagai *Jihad Fi Sabilillah* pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 untuk mempertahankan kemerdekaan kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia (Chalid, 1965d: 7).

Revolusi nasional Indonesia yang multikomplek tersebut dijiwai oleh semangat agama, maka unsur agama adalah unsur mutlak dalam proses revolusi Indonesia. Unsur agama Islam adalah suatu kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dengan semangat ketuhanan, semangat kegotong-royongan, semangat kekeluargaan, semangat kerakyatan, semangat kemanusiaan, semangat berkeadilan, ramah tamah dan sifat berbeda tapi satu tujuan atau bhineka tunggal ika (Chalid, 1965e: 5). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, gotong royong, kekeluargaan dan lainnya adalah ajaran Islam.

Didalam haluan politik negara yang ditulis oleh KH Idham Chalid tidak hanya menulis mengenai revolusi nasional Indonesia, beliau juga membahas mengenai pancasila yang merupakan petunjuk dan ilham dari Allah Swt. kepada Soekarno:

"Setelah Bung Karno pada malam hari menjelang tanggal 1 Juni 1945 bertafakur dan dengan segala kerendahan diri memanjatkan doa kehadirat Allah Swt. pada malam itu berdoaah Bung Karno: "Ya Allah, ya Rabbi berikanlah petunjuk kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku apa yang besok pagi akan kukatakan, sebab Engkaulah ya Tuhanku mengerti bahwa apa yang ditanyakan kepadaku oleh ketua Dokuritsu Tyunbi Tyoosakai itu bukan barang yang remeh, yaitu dasar dari pada Indonesia Merdeka". Setelah Bung Karno mengucapkan doa itu, Bung Karno merasa mendapatkan petunjuk, "saya merasa mendapatkan ilham" kata Bung Karno selanjutnya "ilham yang berkata; galilah apa yang hendak kamu jawab itu dari bumi Indonesia sendiri". Oleh sebab itu Bung Karno berkata; "padahal aku mengeluarkan galian Pancasila karena malamnya aku memohon kepada Allah Swt., bukan Soekarno yang mengadakan Pancasila, tetapi ialah sebenar-benarnya pemberian dari Allah SWT sebagai ilham kepada Soekarno (Chalid, 1965f: 6)."

Pancasila adalah amanat dari Allah Swt. yang diilhamkan kepada presiden Soekarno yang harus diterapkan di Indonesia sebagai landasan NKRI, khususnya sila kesatu yaitu keTuhanan yang maha Esa harus dijadikan sebagai falsafah hidup dan dasar negara Indonesia. Dalam Islam sila pertama Pancasila merupakan cerminan dari ketauhidan. Dengan sila yang pertama ini juga telah berhasil mempersatukan seluruh bangsa dan rakyat Indonesia yang berbeda-

beda dan disana juga tersirat ajaran untuk sikap beragama yang baik yaitu saling menghormati satu sama lainnya.s

Bung Karno juga membangun sosialisme Indonesia yang dilandaskan oleh Pancasila, yaitu sosialisme yang bertaqwa kepada Allah SWT dengan niat hanya beribadah kepada-Nya. Usaha-usaha yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah hadiah dari Allah sesuai dengan pembukaan UUD 45 yang berbunyi “Berkat rahmat Allah yang maha kuasa (Chalid, 1965g: 4).”

Poin selanjutnya dari pancasila yaitu kebangsaan, kebangsaan dalam pandangan Islam mempunyai landasan di dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai segenap manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu terdiri dan jenis laki-laki dan wanita, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa semata-mata agar kamu saling kenal-mengenal.”

Perbedaan adalah *sunatullah* dan merupakan anugrah dari Allah Swt., Indonesia yang berbeda-beda dan beragam bahasa, suku dan agama bertujuan untuk bersatu dalam perbedaan tersebut, untuk saling mengenal di antara yang lain, saling bantu-membantu dan tolong-menolong dalam hal kebaikan.

Poin selanjutnya dari Pancasila adalah perikemanusiaan, Soekarno menjelaskan bahwa manusia adalah jiwa yang merasakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dan bahwa jiwa yang berusaha berdiri, yang menjadi ciri jiwa manusia, lebih tinggi daripada jiwa binatang. Menurut Bung Karno, rasa kemanusiaan adalah hasil dari pertumbuhan budaya dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Kemanusiaan adalah hasil evolusi pikiran manusia (Chalid, 1965g: 4).

Wujud dari perikemanusiaan tersebut yaitu menciptakan dunia baru yang terbebas dari kolonialisme dan imperialisme, karena penjajahan dalam bentuk apapun telah menciptakan sistem menjajah oleh manusia kepada manusia yang lain. Selain dari itu bentuk dari perikemanusiaan adalah menjalin persahabatan dan kerjasama antara bangsa dengan dilandasi saling menghormati dan saling menguntungkan.

Poin seterusnya dari Pancasila adalah kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan tertinggi didalam negara Indonesia berada ditangan rakyat, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan musyawarah dalam perwakilan yang dilandaskan atas kepribadian bangsa

Indonesia. Maka jelas demokrasi Indonesia adalah demokrasi terpimpin (Chalid, 1965g: 4).

Sila selanjutnya adalah keadilan sosial merupakan tujuan negara Indonesia yaitu tercapainya suatu masyarakat yang merasakan keadilan dan kemakmuran baik yang bersifat material maupun spiritual (Chalid, 1965g: 4). Itulah penjelasan Pancasila yang merupakan anugrah dari Allah Swt. kepada bangsa dan negara Indonesia.

Arah Indonesia terkait dengan berdiri di atas kedua kaki (kemerdekaan).Asas meyakini kesanggupan dan kesanggupan bangsa Indonesia untuk menggunakan kekuatannya sebagai pengerahan untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, atau agamanya.Bantuan berarti kekuatan ekonomi sejati dengan menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai kebijakan dan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi yang mengembangkan industri dalam negeri dan bermanfaat bagi pembangunan negara. Untuk meningkatkan kekuatan ekonomi yang ada, perlu dilakukan penguatan terhadap upaya pengolahan sumber daya alam dan bahan baku di Indonesia (Chalid, 1965h: 4).

Kekuatan ekonomi rakyat Indonesia dengan prinsip kemandirian ini adalah pembangunan ekonomi,s spiritual dan keagamaan mereka dan tenaga kerja Indonesia dari buruh, petani dan militer.Selain itu, pelaku ekonomi negara dikuasai oleh daerah, proyek pembangunan nasional, dan pelaku ekonomi swasta yang maju.

Dalam penutup tulisan KH Idham Chalid di Haluan Politik Negara, ia mengutip perkataan Bung Karno sebagai berikut:

“Bersabar hatilah rakyatku!

Bertekad teguhlah rakyat Indonesia yang gagah perkasa!

Hanya bangsa yang besar dapat dan mampu mengemban dan melaksanakan ide yang besar!

Hayu berdiri tegak! maju terus!

Maju terus pantang mundur!

Tuhan seru semesta alam insyaallah berserta kita!(Chalid, 1965h: 7).

Kata-kata Presiden Sukarno itu menunjukkan sikap optimis bangsa Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar dan mampu berdiri tegak dan merdeka.Dalam hal ini, Sukarno menegaskan bahwa Allah Swt. bersama kita, bangsa Indonesia.

PENUTUP

Demokrasi terpimpin menurut ijtihad politik KH Idham Chalid sejalan dengan ajaran Islam yang diajarkan untuk bermusyawarah, dan Nabi Muhammad Saw. juga memutuskan suatu masalah melalui musyawarah. Ide politik tentang demokrasi terpimpin dapat diringkas dalam tiga poin. Pertama, esensi demokrasi adalah menghormati pendapat kelompok minoritas, dan kedua menghormati kebebasan berekspresi rakyat atau kehendak penguasa untuk dikonsultasikan. Dan ketiga musyawarah adalah ukuran minimal dari demokrasi. Hal ini didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an, hadits Nabi, kisah Nabi Muhammad dan para sahabatnya, dan kata-kata para ulama. Menurut KH Idham Chalid, konsep demokrasi terpimpin bisa konsisten dengan ajaran Islam selama mengandung dua unsur: unsur musyawarah yang menjunjung tinggi kepemimpinan dan unsur pimpinan yang menekankan musyawarah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurahman, D. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Adrian, V. (2011). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Chalid, I. (1965a). *Islam dan Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Api Islam.
- Chalid, I. (1965b, July). Haluan Politik Negara. *Majalah Api Islam, Nomor 2*.
- Chalid, I. (1965c, July). Haluan Politik Negara. *Majalah Api Islam, Nomor 3*.
- Chalid, I. (1965d, August). Haluan Politik Negara. *Majalah Api Islam, Nomor 6*.
- Chalid, I. (1965e, August). Haluan Politik Negara. *Majalah Api Islam, Nomor 7*.
- Chalid, I. (1965f, August). Haluan Politik Negara. *Majalah Api Islam, Nomor 4*.
- Chalid, I. (1965g, August). Haluan Politik Negara. *Majalah Api Islam, Nomor 5*.
- Chalid, I. (1965h, September). Haluan Politik Negara. *Majalah Api Islam, Nomor 9*.
- Cindy, A. (1984). *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat, (Penerjemah) Abdur Bar Salim*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hidayatullah, N. (2018). Idham Chalid di Nahdlatul Ulama. *Idrak: Journal Of Islamic Education, 1*(1), 1–18. Retrieved from <http://jurnal.stit-rh.ac.id/index.php/idrak/article/view/1>
- Indianto S., D., Nurasih, W., & Witro, D. (2021). Demokrasi Hibrid: Pemikiran Yasraf Amir Piliang tentang Demokrasi Indonesia di Era Digital. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 11*(1), 175–194. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i1.12253>

- Irawan, B. B. (2007). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Perspektif*, 5(3), 54–64. <https://doi.org/10.36356/hdm.v5i1.312>
- Kadriyanti, A. F. (2013). *Media dan Propaganda Politik*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kurniawan, D. (2016). Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(1), 94–111. <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10770>
- Mandan, A. M. (2008). *Napak Tilas Pengabdian Idham Chalid: Tanggung Jawab Politik NU Dalam Sejarah*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Muhajir, A. (2007). *Idham Chalid Guru Politik Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Nash, K. (2000). *Contemporary Political Sociology*. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
- Nurjaman, A., Sulaiman, A., & Purnama, A. (2020). Peran KH. Idham Chalid dalam Konferensi Islam Asia Afrika di Kota Bandung Tahun 1965. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(1), 147–176. <https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9193>
- Nurjaman, A., Yusuf, M., & Witro, D. (2021). Islamic Boarding School People In Politics (Case Study of Miftahul Huda Islamic Boarding School Manonjaya Tasikmalaya). *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, 15(2), 160–169. <https://doi.org/10.52048/inovasi.v15i2.240>
- Rohmah, A. (2019). *Dinamika Sejarah Politik NU: Studi Tentang Hubungan NU dan Negara pada Masa Dr. KH Idham Chalid tahun 1956-1984 M*. Surabaya: Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel.
- Sulasman, S. (2014). *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tirto.id. (2021). Sejarah Sistem Demokrasi Terpimpin Sukarno di Indonesia 1959-1965. Retrieved February 3, 2022, from <https://tirto.id/sejarah-sistem-demokrasi-terpimpin-sukarno-di-indonesia-1959-1965-gbBf>
- Wasino, W. (2009). Demokrasi-Dulu, Kini, dan Esok. *Disampaikan Dalam Diskusi Sejarah “Wajah Demokrasi Indonesia” Diselenggarakan Oleh Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta, Departmen Kebudayaan Dan Parivisata, Di Gedung LPMP, Semarang, Tanggal 30-31 Maret 2009*, 1–18.
- Witro, D. (2019). Peaceful campaign in election al-Hujurat verse 11 perspective. *Alfuad: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan*, 3(2), 15–24. <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1796>

Witro, D. (2020). Ulama and Umara In Government Of Indonesia: A Review
Of Religion and State. *Madania*, 24(2), 135–144.
<https://doi.org/10.29300/madania.v24i2.3778>